

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Nida Andina<sup>1</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>, Nurwani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>

nidaandina2000@gmail.com, nurlaila@uinsu.ac.id, nurwani@uinsu.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Metode penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sei Nadoras, dan data yang digunakan dalam analisis berasal langsung dari tanggapan atas kuesioner yang peneliti berikan kepada kelompok sampel yang terdiri dari tiga puluh pekerja yang menjadi responden. Pendekatan pengambilan sampel saturasi digunakan dalam pengumpulan sampel untuk penyelidikan ini. Hasil penelitian menunjukkan, Nilai t hitung sebesar 1,706 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,04841, dan nilai signifikansi 0,099 yang lebih besar dari 0,05. Maka, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak dapat menjelaskan mengapa laporan keuangan berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, dampak tidak dapat diperhitungkan dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa hanya dimensi penilaian resiko yang terdapat dalam sistem pengendalian intern pemerintah saja yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan hanya dimensi andal saja yang tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.

**Kata Kunci:** Kualitas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine the influence of the Government Internal Control System (SPIP) on the quality of financial reports produced by the Sei Nadoras Village Office, Bandar Pasir Mandoge District. This research method is associative research. This research was conducted at the Sei Nadoras Village Office, and the data used in the analysis came directly from the responses to the questionnaires that the researchers gave to the sample group which consisted of thirty workers who were the respondents. A saturation sampling approach was used in sample collection for this investigation. The results showed that the tcount value was 1.706 which was smaller than the ttable value of 2.04841, and the significance value was 0.099 which was greater than 0.05. Thus, the Government Internal Control System (SPIP) cannot explain why financial reports are of high quality. This shows that the impact cannot be calculated from the internal control system on the quality of financial reports. From the results of the study it was also found that only the risk assessment dimension contained in the government's internal control system did not affect the quality of financial reports, and only the reliable dimension was not affected by the government's internal control system.*

**Keywords:** *Quality of Financial Reports, Financial Reports, Government Internal Control System (SPIP)*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa ialah tingkatan dalam pemerintah yang paling rendah dengan berinteraksi secara langsung bersama konstituennya, sehingga dalam posisi unik untuk memberikan bantuan kepada pemerintah pusat di bidang pemberdayaan masyarakat secara langsung, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Desa ialah entitas geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya tersembunyi yang mempengaruhi wilayah lain. Oleh karena itu, kegiatannya memerlukan pengawasan. Pemerintah dan DPR setelah menghasilkan dan menandatangani UU No 6 tahun 2014 mengenai Desa serta peraturan kementerian Dalam Negeri 113 mengenai pedoman umum dalam memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban saat menyelenggarakan pemerintahan desa (Aji & Setiawan, 2022)

Berdasarkan peraturan kementerian Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman dalam mengelola keuangan desa, pelaporan hasil mengelola finansial desa adalah sebuah wujud tanggung jawab performa kepada masyarakatnya. Setiap pelaporan finansial yang dihasilkan oleh sebuah desa harus memenuhi persyaratan yang ketat dan tunduk pada pemeriksaan publik. Hal ini karena laporan keuangan akhir akan digunakan sebagai acuan oleh semua perusahaan dalam membuat pilihan kebijakan dan tata kelola. Informasi yang diberikan adalah sebuah unsur yang dapat digunakan untuk menilai mutu sebuah pelaporan finansial.

Pelaporan keuangan tergantung pada struktur yang akan mengendalikan sebuah desa. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal menjadi prosedur yang mendapatkan pengaruh dari manajemen untuk memastikan efisiensi, efektivitas, kepatuhan pada aturan undang-undang serta validitas laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal merupakan pendekatan membangun kepercayaan. Metode serta kebijakan untuk memenuhi tujuan, memberikan informasi keuangan yang akurat dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang menyusun program pengendalian internal sebuah usaha. Program pengendalian internal yang benar harus menangkap masalah keuangan. Hal ini akan mempercepat dan meningkatkan akuntansi serta meyakinkan penduduk lokal tentang pelaporan keuangan pemerintah Desa. Kajian oleh Rosmalita & Nadirsyah (2020) menggambarkan bahwasanya program pengendalian internal perusahaan memberikan pengaruh pada mutu pelaporan keuangan. Laporan keuangan membuktikan bahwa program

pengendalian internal sebuah usaha.

Manajemen dan staf harus mengikuti sistem pengendalian internal (ICS) untuk mencapai tujuan sebuah usaha dengan operasional yang efisien, laporan finansial yang akurat, penjagaan terhadap aset publik dan ketaatan pada aturan serta hukum yang ada. Operasional sebuah usaha secara efektif, laporan finansial yang valid, pelestarian aset publik, dan kesesuaian dengan norma dan hukum menjamin tujuan perusahaan. Keputusan manajemen dan staf ICS (Firmansyah & Sinambela, 2020). SPIP mungkin memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap efisiensi penerapan sistem informasi keuangan oleh pemerintah. Keunggulan dari sistem pengendalian intern cukup untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Sabriana & Zuhri, 2023).

Terjadinya informasi dalam laporan keuangan desa yang berkualitas rendah membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran serta kesalahan dalam aspek finansial. Sesuai dengan temuan wawancara pertama yang dilakukan peneliti bersama Bapak Taufan Nasution dalam kapasitasnya sebagai kepala keuangan, peneliti mencatat bahwa: "Masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa terletak pada keterlambatan penyelesaian DD. dan tambahkan laporan pertanggungjawaban."

Ketepatan waktu pelaporan keuangan mengacu pada jumlah waktu yang telah berlalu setelah buku perusahaan ditutup sebelum publik mengetahui laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Misalnya, batas akhir laporan ditetapkan 30 Juli, namun masih banyak desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang belum selesai hingga akhir 30 Juli. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan lebih bermanfaat daripada yang tidak diserahkan tepat waktu (Wawancara dengan Taufan, pada tanggal 15 Februari 2023). Untuk melaksanakan pembangunan ini dengan biaya, Desa Sei Nadoras masih perlu memperoleh sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Desa Sei Nadoras mendapatkan bantuan dari Dana Desa pada tahun 2019, namun karena keadaan alam, tidak ada pembangunan yang dilakukan pada tahun tersebut.

Selain itu, menjelang akhir tahun 2019 terjadi pergantian kepemimpinan desa, dan belum disahkan hingga pertengahan tahun 2020. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat belum dimulai hingga tahun 2020. Salah Penyediaan dana sumber daya

berupa Dana Desa adalah sebuah program yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Asahan dalam rangka peningkatan kebudayaan masyarakat. Kajian ini berfokus kepada sistem pengendalian internal pemerintahan sebagai sarana untuk mengelola keuangan Desa tahun 2020 sebagai bagian dari investigasinya pada keuangan desa yang dikelola di Desa sei nadoras.

Penelitian ini mengkaji Bagaimana dampak dari sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) pada mutu pelaporan keuangan yang dihasilkan di kantor pedesaan sei nadoras Desa Bandar Kecamatan mandoge pasir. Mereka juga ingin mengetahui apakah mekanisme SPIP mempengaruhi mutu pelaporan keuangannya.

## **KAJIAN TEORI**

*Stewardship theory* ialah sebuah kondisi di mana manajemen tidaklah didorong oleh tujuan seseorang namun cenderung terpusat kepada tujuan pokok yakni keperluan perusahaan *Stewardship theory* ialah situasi yang mana manajemen tidaklah terdorong oleh tujuan seseorang Landasan dari teori ini ialah gagasan bahwa orang pada umumnya memiliki kepribadian yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan sadar diri yang juga mampu bertanggung jawab dan bertindak. (Sari & Andra, 2021).

Pemerintah daerah berperan sebagai pengelola dalam situasi ini, dan masyarakat berperan sebagai pemilik dan/atau kepala sekolah, menurut penelitian Kumala et al. untuk tahun 2023. Teori ini mendefinisikan pemerintahan desa sebagai badan publik yang melayani masyarakat dan secara efektif mencapai tujuan organisasi.. (Kumala et al., 2023). Gagasan ini mencirikan pemerintahan desa menjadi sebuah organisasi di bidang masyarakat yang dapat diandalkan serta dipercaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sebagai bentuk pemenuhan tujuan sebuah usaha dengan sebaik-baiknya (Afifi et al., 2021).

Menurut Firmansyah & Sinambela (2020) sederhananya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk melindungi aset perusahaan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan manajemen, dan meningkatkan kemanjuran organisasi. Sistem pengendalian internal adalah kumpulan struktur, proses, dan perlindungan organisasi yang saling berhubungan yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin integritas catatan keuangan, meningkatkan keluaran, dan mendorong kesesuaian dengan praktik terbaik manajemen. Sistem kendali intern ialah klausul

ataupun aturan yang dimaksudkan agar dapat melindungi kekayaan ataupun aset sebuah organisasi atau bisnis. Komponen penting tata kelola ialah pengendalian internal, dan sistem pengendalian internal itu sendiri ialah undang-undang atau kebijakan.

Adanya sistem pengendalian intern dapat berdampak pada bagaimana pengambilan keputusan tentang pemerintahan desa dan dapat mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab. Administrasi desa dan praktik manajemen yang digunakan oleh pemerintah desa mungkin mendapatkan banyak kepercayaan berkat sistem kontrol internal. Untuk menjamin agar pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai penatalayan dapat terlaksana dengan baik, maka teori penatalayanan memerlukan penerapan sistem pengendalian intern, yang dapat berbentuk peraturan ataupun regulasi agar dapat menjaga kekayaan ataupun aset pemerintahan. Implementasi sistem kendali intern dapat berwujud kebijakan ataupun peraturan dalam mengamankan kekayaan ataupun aset pemerintahan karena segala sesuatunya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas (Sari & Andra, 2021).

SPIP merupakan sistem kendali internal yang dilaksanakan sepenuhnya pada lingkungan pemerintahan daerah serta pusat sesuai dengan PP No 60 tahun 2008 mengenai sistem kendali internal pemerintahan. Mengingat bahwasanya pemerintah memiliki mekanisme kontrol internal, aturan ini dibuat. Dalam hal ini, Inventarisasi bertindak sebagai kepala pemerintahan dan bertugas menetapkan dan menempatkan sistem pengendalian internal di seluruh cabang eksekutif. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pada masing-masing konteks pemerintahan yang berbeda menjadi tanggung jawab kementerian keuangan pada posisinya yang menjadi bendahara negara secara umum. Sedangkan gubernur, bupati serta walikota bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan dengan baik sistem kendali internal pada lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpin sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah (Dimas & Arnida, 2022).

Sehubungan pada penemuan investigasi di tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Oka & Welly (2017), bahwa mutu pelaporan keuangan suatu wilayah yang disajikan oleh kantor cabang dinas pendapatan daerah di kabupaten pelabuhan ratu Sukabumi 2 berhubungan dengan efisiensi sistem kendalian internal yang berlaku di sana. Hasil penelitian oleh Askikarno (2019) beberapa faktor telah terbukti secara signifikan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan diantaranya ialah lingkungan

kendali, nilai resiko, kegiatan pengendalian komunikasi serta informasi, dan kegiatan memantau kualitas. Hasil studi yang dilakukan oleh Ahmad (2016), bahwasanya mutu pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan di wilayah kabupaten Lamongan disebabkan oleh efektivitas sistem pengendalian internya secara signifikan.

Hasil studi yang dilakukan oleh Gratiano (2019), bahwa Departemen Sumber Daya Manusia tidak siap untuk melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kurangnya komitmen dari Kepala dan Pimpinan Daerah merupakan hambatan utama lainnya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan bidang yang membutuhkan investasi besar, baik berdasarkan aspek kualitas ataupun kualitasnya. Hasil studi oleh BRM & Septiana (2020), bahwa kapasitas untuk mengelola indikator nilai resiko, lingkungan, tindakan kendali, pertukaran komunikasi serta informasi dan memantau pelaporan keuangan pemerintahan suatu wilayah dapat membuktikan perbedaan kualitas laporannya.

Pelaporan keuangan berasal pada pengumpulan dan pencatatan data transaksi bisnis. Seorang akuntan harus menganalisis dan menyusun data akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang rinci umumnya mencakup pelaporan kedudukan finansial, pelaporan keuntungan dan kerugian, pelaporan perubahan modal yang bisa disalurkan untuk menjadi pelaporan arus dana ataupun kas, pelaporan catatan dan lainnya seperti pelaporan atau, modul deskripsi. Laporan keuangan yang diaudit juga menganalisis standar dan praktik akuntansi keuangan (Amalia et al., 2023). Salah satu alasan mengapa laporan keuangan dibuat ialah agar dapat menunjukkan apa yang coba dilakukan oleh manajemen dengan bantuan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Percakapan bisnis terdiri dari laporan keuangan keuangan, dimana laporan tersebut terdiri dari status keuangan perusahaan di pihak pengguna laporan. Dengan membaca laporan tersebut, seseorang juga dapat mengetahui tentang posisi kesehatan keuangan agensi saat ini, yang merupakan informasi penting bagi banyak pihak yang tertarik dengan topik tersebut (Desmintari & Aryani, 2021).

Laporan Keuangan digunakan sebagai dasar dalam Pengambilan Keputusan, maka laporan Sangat penting bahwa informasi keuangan yang akurat dan terkini disediakan oleh pemerintah. Selain itu, Laporan Keuangan wajib memberikan pengungkapan yang memadai atas informasi yang berpotensi mempengaruhi

pengambilan keputusan. (Rahmawati & Putri, 2022). Laporan keuangan organisasi di sektor publik secara alami diproduksi untuk memenuhi berbagai tujuan dan fungsi umum, meliputi pemerintah. Memberikan bukti akuntabilitas dan pelayanan dan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, mengevaluasi manajer dan organisasi, dan membuat penilaian. Untuk memenuhi tujuannya, informasi akuntansi harus menunjukkan Kualitas Laporan Keuangan. Langkah ialah fitur. Laporan Keuangan Pemerintah harus memenuhi empat standar kualitas normatif: dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Susilo & Akbar, 2020).

Komputer, internet, dan bentuk teknologi komunikasi lainnya, bersama dengan sistem manajemen internal, dapat membantu masyarakat mendapatkan uang sebanyak mungkin. laporan keuangan berkualitas tinggi. Stewardship theory memprediksi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, pejabat sekolah berjuang dengan penganggaran. Kesejahteraan masyarakat dan kewajiban pengelolaan kekayaan negara mengharuskan akuntansi dimasukkan dalam pembagian kerja antara pemilikan dan pengelolaan. Rosmalita & Nadirsyah (2020) mengungkapkan bahwasanya sistem kendali internal mempunyai dampak yang menguntungkan dan signifikansi secara statistik pada keakuratan pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya sistem kendalian internal yang efektif dalam memperbaiki pelaporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintahan desa. pelaporan keuangan dari instansi pemerintahan desa akan lebih dapat diandalkan jika instansi tersebut memiliki mekanisme kendali internal yang baik.

Sistem kendali internal merupakan prosedur menyeluruh yang memastikan cerainya tujuan sebuah organisasi dengan operasional yang efisien serta efektif. laporan keuangan yang baik, penjagaan kekayaan negara serta kepatuhan pada semua aturan undang-undang yang relevan. Lingkungan lebih baik diterapkan berkat mekanisme kontrol internal. kontrol, penilaian risiko, tindakan kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan akan meningkatkan pelaporan keuangan.

Kajian ini memperluas dan mengkontraskan temuan-temuan dari penyelidikan serupa. Temuan studi terkait tercantum di bawah ini. Berdasarkan studi oleh Rosmalita & Nadirsyah (2020), sebanyak 78 Petugas Administrasi Keuangan (PPK) dan Fasilitator PPK terlibat dalam pelaksanaan survei di 39 SKPD Banda Aceh. Informasi dilakukan

analisa Melalui penggunaan pemodelan regresi linear berganda. Studi ini membuktikan bahwasanya mutu pelaporan keuangan SKPD dalam kota Banda Aceh dipengaruhi oleh sistem data dalam akuntansi, sistem kendali internal serta kemampuan SDM.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reu & Lasdi (2021). Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sebagai variabel bebas, sedangkan laporan keuangan Dana Desa sebagai variabel terikat. Survei ini mengambil sampel 62 masyarakat Kabupaten Badung. Total ada 16 kecamatan dan 46 desa. Penyebaran kuesioner terstruktur (tertutup) dan dokumentasi menjadi sarana pendekatan pengumpulan data yang dilakukan. Penggunaan langsung regresi linier sebagai alat analisis digunakan dalam penyelidikan saat ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, penerapan aplikasi Siskeudes pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Badung. Kesimpulan ini didapat setelah peneliti melakukan penelitiannya.

Investigasi yang sama dilakukan oleh Suwarno & Musafik (2022), survei dikirimkan kepada 120 orang yang bekerja di bidang administrasi keuangan di 15 kantor pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY disempurnakan dengan kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini terlihat jelas di ketiga wilayah tersebut. Penelitian Suwarno & Musafik (2022) menggunakan beberapa jenis variabel independen, kemampuan SDM, penggunaan teknologi, mutu sebuah informasi, dorongan manajemen puncak serta mutu sistem. Studi tersebut menemukan bahwasanya teknologi dan kemampuan SDM mengatur hubungan antara pelaksanaan sistem finansial pemerintahan desa dan mutu pelaporan keuangannya sehingga hal tersebut berhasil. Mutu informasi, Dorongan manajemen senior, serta mutu sistem tidaklah mempengaruhi Siskeudes dan kualitas laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini bersifat kualitatif. Studi ini memanfaatkan *Independent variable* serta *dependent variable*. *Dependent variable* pada studi ini ialah sistem kendali internal pemerintahan (X), yakni prosedur menyeluruh dari kegiatan serta tindakan pemimpin dan pekerja yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan misi organisasi. Kualitas Laporan Keuangan (Y), variabel independen, ialah kelengkapan dan kebenaran

laporan keuangan yang memberikan informasi masa lalu dan masa depan sesuai dengan aturan akuntansi yang diterima secara luas.

Populasi sampel penelitian ini ialah semua 30 pegawai dari berbagai struktur Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kabag Humas, Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Pemerintahan, Kabag Kelurahan. Kesra, Kepala Dinas, kepada dusun I hingga VIII, serta lain-lain. Sample jenuh ialah pendekatan yang dilakukan untuk mengambil sampling yang mana seluruh populasi dimanfaatkan untuk menjadi sampling, digunakan dalam mendapatkan sampel untuk penyelidikan ini. Ini ialah praktik umum ketika ada kurang dari 30 orang di area tertentu.

Data utama, atau data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban. Kuesioner yang dikirim ke responden bersifat tertutup, dan pertanyaan serta pilihan jawaban disajikan dalam urutan berikut pada skala Likert.

SPSS Statistics V.25 digunakan untuk menganalisis data dari penelitian ini. Beberapa putaran inspeksi dilakukan pada data yang diproses. Uji validitas ialah standar emas untuk memeriksa reliabilitas suatu survei. Ketika jawaban atas pertanyaan dalam survei dapat menjelaskan variabel yang sedang dinilai, kami mengatakan bahwa survei tersebut memiliki validitas. Secara khusus, membandingkan skor item kuesioner dengan jumlah total item ialah ukuran validitas yang andal. Adapun kriteria pengujian ialah 1. Apabila besaran R hitung atau *pearson correlation* lebih tinggi dari R tabel sehingga poin-poin pertanyaan dinilai memiliki validitas. Namun apabila besaran R hitung atau *pearson correlation* lebih kecil dari R tabel maka poin-poin pertanyaan dinilai tidak memiliki validitas.

Kedua, kuesioner dapat menjadi indikasi variabel konstruk, dan uji reliabilitas ialah sarana untuk mengujinya. Rumus Alpha Cronbach untuk menentukan keterpercayaan suatu kumpulan data. Ketepatan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah definisi reliabilitas. Dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, uji reliabilitas berbantuan SPSS ini menentukan apakah kuesioner cenderung memberikan hasil yang konsisten atau tidak ketika diberikan beberapa kali pada sampel yang sama. Variabel kuesioner dikatakan dapat dipercaya jika skor Cronbach Alpha-nya

lebih besar dari 0,334/0,6.

Ketiga, dalam model regresi, uji normalitas menentukan apakah dependent variable serta independet variable mempunyai pendistribusian secara normal. V4 pengujian heteroskedastisitas yakni pengujian yang menetapkan Apakah variabel penghambat suatu observasi berbeda dengan yang lainnya pada pemodelan regresi.

Tujuan dari keempat teknik regresi linier dasar ialah untuk memperkirakan kekuatan korelasi di antara dependent variable serta independet variable. Teknik tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan peramalan, memperkirakan hubungan antara perubahan positif dan negatif dalam satu variabel (X) dan perubahan lain (Y), dan sebaliknya.

Pengujian-t ataupun pengujian parsial kemudian dimanfaatkan agar dapat mengidentifikasi seberapa besar dampak dari setiap independent variable pada dependent variable. Sebagai hasil dari pengujian t tersebut, kita bisa melihat bahwa tabel koefisien tingkat signifikansi ditetapkan senilai 0,05 ataupun 5%. Ha diperbolehkan serta H0 dibuang jika dan hanya apabila t hitung lebih tinggi nilainya dari t tabel. Berarti independent variable memberikan pengaruh yang besar pada dependent variable.

Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel menunjukkan bahwa independent variable memberikan pengaruh pada dependent variable, terima H0 dan tolak Ha. Penelitian ini juga dapat mengetahui bagaimana setiap variabel bebas mengubah variabel terikat dengan melihat nilai  $r^2$ . Variabel independen yang paling penting adalah variabel yang memiliki nilai  $r^2$  tertinggi.

## HASIL PENELITIAN

Hasil uji regresi linear sederhana ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Uji Regresi Linier Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	23.702	5.688		4.167	.000
	SPIP	.293	.172	.307	1.706	.099

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Mutu pelaporan keuangan pemerintahan merupakan dependent variable dan sistem kendali internal pemerintahan merupakan independent variable dalam persamaan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara keduanya. Tabel data terlampir mengungkapkan bahwa konstanta ini sama dengan 23,702. Dapat diamati dari hasil regresi bahwa persamaan regresi linier dasar terlihat seperti ini.:

$$Y = 23,702 + 0,293X$$

Persamaan regresi linier sederhana tersebut menunjukkan nilai  $\alpha$  ialah 23,702 dan nilai  $\beta$  ialah 0,293X. Dari fakta-fakta ini, kita dapat mengatakan bahwa apabila terjadi persatuan maka 0,293.

**Tabel 2.**  
**Uji T (Uji Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.702	5.688		4.167	.000
	SPIP	.293	.172	.307	1.706	.099

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian-t menentukan apakah Independent variable berkaitan dengan dependent variable dengan signifikan dalam beberapa cara. Untuk uji coba tersebut kami memanfaatkan tingkatan signifikansi 0,05 ataupun 5% serta nilai df dari tabel anova yang bernilai sebanyak 28 (df = n-2 sehingga 30-2=28). T tabel ialah 2,04841 bila signifikansi dua sisi ditetapkan sebesar 0,025. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya H1 diterima serta H0 ditolak karena hasil uji t tabel koefisien membuktikan bahwa besaran t hitung ialah 1,706 artinya t hitung 2,04841, 0,099 lebih besar dari t tabel yakni lebih besar dari 0,05.

**Tabel 3.**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.307 <sup>a</sup>	.094	.062	2.872	

a. Predictors: (Constant), SPIP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Menganalisis korelasi antara mutu pelaporan keuangan dan sistem kendali internal pemerintahan Melalui penggunaan koefisien determinasi. Besaran R square dalam tabel tersebut ialah 0,094 atau 9,4% artinya independent variable yakni sistem kendali internal pemerintahan hanya menjelaskan 9,4% dari perbedaan dependent variable yaitu mutu pelaporan keuangannya. Perbedaan mutu pelaporan keuangan sebesar 90,6% yang lain diakibatkan oleh aspek-aspek eksternal yang tidak diteliti pada penelitian ini. Tidak ada bukti bahwasanya sistem kendali internal pemerintahan memberikan pengaruh besar serta penting pada seberapa akurat pelaporan keuangannya.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel dengan menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,577 >$  dari  $0,05$ , yang artinya tidak ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya nilai koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang negatif yaitu sebesar  $-0,026X$  dengan bilangan konstanta  $43,391$ . Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 23,940 + (-0,026)X$ .

Hal ini berarti dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah belum tentu dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh adalah sebesar  $0,010$  atau  $1\%$ , yang berarti bahwa variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) tidak mempengaruhi variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar  $1\%$  sedangkan sisanya yaitu sebesar  $99\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi dominan terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengendalian internal pemerintahan tidak memberikan pengaruh pada mutu pencatatan finansial. Studi ini membuktikan bahwasanya mutu data finansial tidak diberikan pengaruh oleh kendali internal pemerintahan. Sistem kendali internal tidak mengubah kebenaran pelaporan keuangannya karena  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel melalui tingkatan signifikansinya yakni  $0,099 > 0,05$ .

Penelitian ini memiliki hasil yang lain. Menurut temuan penelitian Tuti (2014), sistem pengendalian internal yang efektif secara signifikan meningkatkan kredibilitas pelaporan anggaran kota. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, Dimas & Arnida (2022), bahwa Sistem Pengendalian Intern Dinas Sosial Provinsi Sumatera pada kualitas pelaporan keuangannya secara efektif. Berdasarkan temuan dari Rikhardus et al., (2017), kualitas pelaporan keuangan dalam Kabupaten Nagekeo terlihat meningkat setelah diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah.

## **SIMPULAN**

Simpulan pada penelitian ini adalah sistem kendali internal pemerintahan tidak memberikan pengaruh yang signifikansi pada keakuratan pelaporan keuangannya. Sesuai dengan jumlah responden yang sangat setuju atau memberikan persetujuan mayoritas untuk jawaban “setuju”, serta untuk dimensi penilaian risiko, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwasanya sistem kendali internal pemerintahan kurang menjelaskan mutu pelaporan keuangannya dengan baik. Hal tersebut ditentukan melalui peninjauan proporsi responden yang memberikan persetujuan mayoritas untuk jawaban "setuju".

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifi, Z., Mulyanto, & Nugroho, D. H. (2021). The Effect of Internal Control System and Village Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability. *Jurnal Magister Administrasi*, 5(3), 1120–1124. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/3738>
- Ahmad, F. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 205–212. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/85>
- Aji, A. B., & Setiawan, R. A. (2022). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Desa. *Jatijajar Law Review*, 1(2), 167–178. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.819>
- Amalia, N., Yenni, S. J. N., & Nurwani. (2023). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Lion Metal Works Tbk. Periode 2016-2021. *J-Reb: Journal- Research of Economic Dan Bussiness*, 2(1), 21–35. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Askikarno, P. C. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 120–138. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>

- BRM, T. S., & Septiana, N. D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 213–220. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
- Desmintari, & Aryani, L. (2021). Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan dan Literasi Keuangan pada Koperasi Desmigraf di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(1), 208–215. <https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/11836>
- Dimas, S., & Arnida, W. L. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2947–2954. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/4656>
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Logistic And Accounting Development Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Gratiano, M. M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Populika*, 7(1), 34–49. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/26>
- Kumala, A., Muniroh, H., & Widodo, A. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pendidikan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada kantor desa se-Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(1), 65–72. <https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article/view/924>
- Oka, R. A., & Welly, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Rahmawati, & Putri, N. V. (2022). Pengaruh Intellectual Capital, Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes. *Journal of Management & Business*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.3314>
- Reu, M. F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Rikhardus, S., Anwar, M., & Eris, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2), 1–12. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/download/3870/2354>
- Rosmalita, N., & Nadirsyah. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>
- Sabriana, T., & Zuhri. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Di PTN Pariwisata pada Kementerian

- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). *Jurnal Studi Manajemen*, 5(1), 10–24. <http://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/civitas>
- Sari, N., & Andra, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 142–149. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/18125>
- Susilo, W., & Akbar, R. (2020). Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Akuntabilitas Internal, Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pengambilan Keputusan Keuangan pada Instansi Vertikal Pemerintah Pusat. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59368>
- Suwarno, G., & Musafik, M. N. (2022). Implementasi Aplikasi RKAS dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadiyah Program Plus Tulungagung). *Ekonomi*, 22(2), 318–325. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/3010>
- Tuti, H. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR-Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.44>